



DIGITALISASI ARSIP KEPEGAWAIAN PADA INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM MENGANTISIPASI RISIKO

PENDAHULUAN

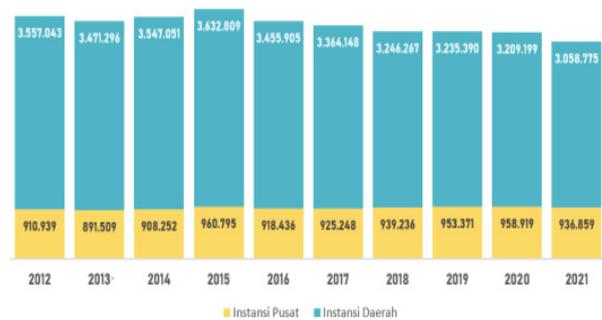
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat akan memengaruhi dinamika kehidupan. Kemajuan teknologi informasi tersebut akan memiliki dampak positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Perkembangan teknologi informasi sangat memudahkan aktivitas manusia yang dapat digunakan untuk mengolah data dan informasi. Hal tersebut meliputi memproses,

mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan dan akurat. Selain memudahkan aktivitas manusia, teknologi juga mampu membantu organisasi atau instansi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan salah satu instansi pemerintah yang selalu responsif adaptif dalam penyelenggara manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam menjalankan tugasnya, BKN selalu mengikuti dan melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dalam melayani ASN. Salah satu inovasi BKN dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah dalam tata naskah/kegiatan arsip kepegawaian. Pengelolaan arsip BKN mempunyai peran strategis, karena menangani semua arsip data pegawai ASN di seluruh Indonesia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Teknologi informasi membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan serta menyebarkan informasi.
- Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dalam rangka memenuhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
- Penyelamatan arsip merupakan prioritas utama bagi instansi BKN sehingga kegiatan digitalisasi arsip kepegawaian di BKN mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko.
- Potensi risiko yang dapat mengancam yaitu, lingkungan, manusia, media arsip, kelemahan organisasi, dan kelemahan teknis.



Grafik di atas merupakan jumlah pertumbuhan PNS Pusat dan Daerah selama sepuluh tahun terakhir. Adanya jumlah total PNS Pusat dan Daerah hingga tahun 2021 sebanyak 3.995.634, maka hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah arsip. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya risiko yang dapat timbul terhadap arsip, BKN dapat menerapkan

Penulis : Ni Made Anais Sri Wandari
Rina Mukti Rahayu
Penanggungjawab : Joko Subakti
Redaktor : Ajib Rakhmawanto
Editor : Haryanah
Katherin
Design Grafis : Ritauli Renyati
Sekretariat : Ilfa Haryani
Alamat : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No.12
Cililitan - Jakarta Timur
Telp : 021-80887011
e-mail : pengkajianpenelitianbkn@gmail.com

kemajuan teknologi informasi dengan digitalisasi arsip. Pada era globalisasi dengan perkembangan yang begitu cepat berubah dan sudah waktunya arsip konvensional diubah ke dalam bentuk digital untuk meminimalisir terjadinya dampak risiko yang dapat timbul seperti rusak atau hilangnya fisik arsip konvensional. Arsip yang telah dialih mediakan ke dalam bentuk digital, artinya masih terdapat cadangan arsip tersebut dalam penyimpanan digital. Mengingat arsip kepegawaian di BKN merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi seluruh pegawai di Indonesia.

DIGITALISASI ARSIP KEPEGAWAIAN

Digitalisasi merupakan proses konversi dari media atau informasi yang tercetak, tertulis, dan/ atau digambar dalam bentuk format digital. Standar digitalisasi diperlukan untuk pengamanan, agar berkualitas tinggi, tersimpan, dan tertata dengan baik sebagai dasar atau pondasi untuk aktivitas alih media atau digitalisasi meliputi semua proses kerja. Tujuan dari digitalisasi merupakan upaya pelestarian arsip, mempertahankan aksesibilitas sehingga dapat memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Adanya digitalisasi arsip dapat digunakan untuk keperluan penelitian, dokumentasi, dan publikasi (Sugiharto, 2010: 53). Selain itu digitalisasi arsip juga mampu melindungi arsip jika terjadi dampak risiko yang nantinya dapat muncul sewaktu-waktu.

Data yang dapat diolah dalam digitalisasi arsip bisa berupa bentuk gambar, suara, video, dan data lainnya. Digitalisasi arsip tak hanya memiliki kemampuan menyimpan tulisan tetapi juga dapat menyimpan data lain yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah data dalam bentuk biner. Digitalisasi arsip nantinya dipelihara dan dijaga pada lokal repositori atau *cloud storage* yang merupakan salah satu strategi pelestarian arsip masa kini supaya selalu mengikuti perkembangan teknologi dan dapat diakses melalui sistem komputer (*online*, *offline*, kapanpun, dan dimanapun).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 40, disebutkan bahwa alih media arsip merupakan salah satu cara (kegiatan) dalam pemeliharaan arsip dinamis. Menurut Suryadi,

Adman, & Sobandi (2017), metode yang digunakan dalam mengalih mediakan dokumen antara lain:

1. Scanning

Alih media yang menghasilkan data gambar yang dapat disimpan di komputer dengan menggunakan *scanner* atau alat pemindai dokumen.

2. Conversion

Proses mengubah dokumen *word processor* atau *spreadsheet* menjadi data gambar permanen untuk disimpan pada sistem komputerisasi.

3. Importing

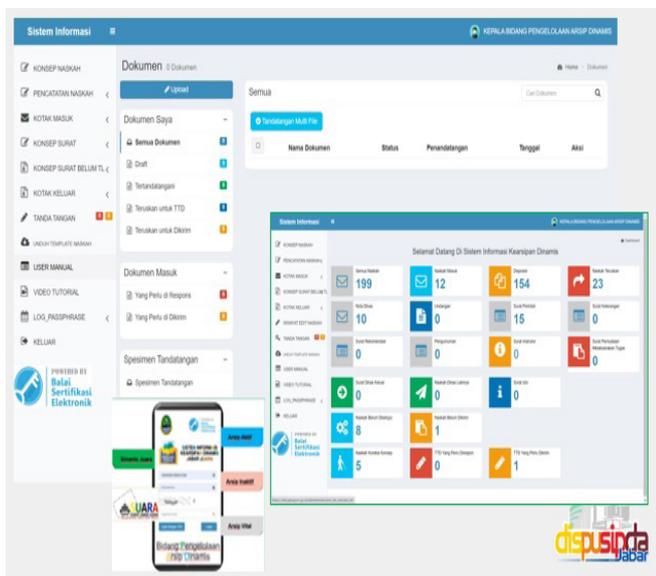
Metode untuk memindahkan data secara elektronik seperti *e-mail*, grafik atau data video ke dalam sistem pengarsipan dokumen elektronik. Data dapat dipindahkan dengan melakukan *drag* dan *drop* ke sistem dan tetap menggunakan format aslinya.

Sistem digitalisasi arsip dapat menghemat ruang yang dialihkan melalui penyimpanan *server* sehingga ASN dapat mengakses dan melacak dokumen elektronik yang dapat memudahkan penggunaan dokumen tersebut dalam pekerjaan atau keperluan.

Terdapat contoh dari digitalisasi arsip yang bisa diterapkan yaitu SIMANIS JUARA milik pemerintah provinsi Jawa Barat. SIMANIS JUARA merupakan transformasi arsip digital dari SRIKANDI yang dibentuk melalui aplikasi milik ANRI dan dikembangkan oleh DISPUSIPDA dan DISKOMINFO Provinsi Jawa Barat. SIMANIS JUARA merupakan peringkat 3 terbaik dalam penilaian pengawasan kearsipan tahun 2021 pemerintah daerah provinsi. Saat ini SIMANIS JUARA sudah mulai digunakan oleh dinas-dinas yang ada di Jawa Barat.

Digitalisasi tersebut dapat dijadikan pedoman dan sharing dalam melakukan digitalisasi arsip kepegawaian. Dengan digitalisasi arsip, kearsipan BKN akan lebih terpusat, mampu meminimalisir resiko, dan memudahkan ketika akan melakukan temu kembali informasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 3 huruf b, dijelaskan salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan untuk menjamin

ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

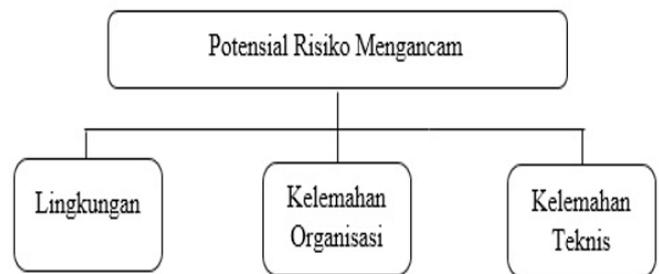


Digitalisasi arsip perlu disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi BKN dalam mengelola data kepegawaian ASN seluruh Indonesia. BKN dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan proses digitalisasi arsip tersebut, hal ini bertujuan agar kegiatan digitalisasi dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk kegiatan kearsipan yang terpusat, dan mampu memiliki sistem digital yang mumpuni.

RISIKO BENCANA PADA ARSIP

Untuk mengantisipasi risiko bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, penyelamatan arsip merupakan prioritas utama bagi seluruh instansi termasuk BKN. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan digitalisasi arsip. Adanya kegiatan digitalisasi arsip kepegawaian di BKN merupakan upaya untuk melakukan penyelamatan arsip dan kontrol terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan melakukan pengaplikasian pada bidang ilmu, dan disesuaikan dengan konteks risiko yang terjadi pada arsip kepegawaian.

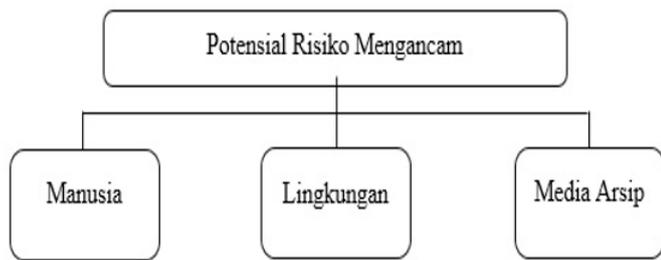
Jika arsip tersebut mengalami rusak atau hilang maka dapat menyebabkan kerugian bagi perseorangan dan instansi BKN. Berikut merupakan potensial risiko mengancam yang dapat terjadi pada arsip kepegawaian menurut Egbuji (1999: 102)



Potensial risiko mengancam pada faktor lingkungan merupakan permasalahan umum yang dapat terjadi pada instansi. Permasalahan tersebut bisa berupa faktor penyimpanan arsip, bahkan bisa dari bencana yang mungkin bisa terjadi seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Media tempat arsip disimpan dan sarana pemrosesannya merupakan ancaman potensial terhadap arsip. Selain dari faktor lingkungan, kelemahan organisasi juga mampu menjadi risiko potensial yang dapat mengancam arsip. Pada kelemahan organisasi, kegiatan organisasi yang tidak mendukung juga memungkinkan bisa timbul terjadinya risiko. Potensial risiko mengancam selanjutnya dari faktor kelemahan teknis. Kelemahan teknis bisa berupa dari aset instansi yang sangat sensitif yang mana apabila tidak dijaga maka dapat menyebabkan terjadinya bencana.

Selain potensial risiko mengancam pada arsip, Egbuji (1999: 103) juga menyebutkan jika terdapat

tiga potensi risiko yang dapat merusak arsip, yaitu:



1. Faktor manusia bisa berupa dari kecerobohan dalam menyimpan atau mengelola arsip itu sendiri. Selain itu, bangunan, mesin, peralatan yang tidak dirawat dengan baik mampu menjadi faktor pendukung pada rusaknya arsip. Lebih banyak informasi yang hilang karena kecelakaan, kecerobohan atau ketika seorang tidak menyadari apa yang perlu dilindungi atau bagaimana hal itu harus dilindungi. Maka dari itu, perlu untuk lebih memperhatikan tentang keberadaan arsip yang ada supaya tidak timbul risiko.
2. Potensi kedua yang dapat merusak arsip berasal dari lingkungan. Ancaman lingkungan terbesar dan mungkin yang paling diabaikan terhadap arsip adalah bencana alam seperti hujan, angin, badai, angin topan, banjir, angin puting beliung, kebakaran atau gempa bumi. Hal tersebut yang utama dapat merusak media arsip konvensional.
3. Potensi terakhir merupakan risiko ketiga yang dapat merusak arsip berasal dari media arsip. Media arsip dapat berupa kertas, foto, dan mikrofilm hingga cakram optik dan kaset audio. Media arsip memiliki masalah dengan keabadian dan daya tahannya.

PENUTUP

Inovasi digitalisasi arsip merupakan prioritas utama bagi BKN untuk penyelamatan arsip yang dikembangkan terkait dengan adanya risiko bencana pada arsip. Selain itu, perkembangan teknologi informasi menuntut segala sektor untuk berjalan dengan cepat. Tujuan dari digitalisasi merupakan upaya pelestarian arsip, mempertahankan aksesibilitas sehingga dapat memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat, dan pengurangan penggunaan kertas dalam arsip kepegawaian

dapat membantu penghematan pengeluaran anggaran biaya instansi. SIMANIS JUARA milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat sebagai rujukan untuk memudahkan dalam penyimpanan dan penemuan digitalisasi arsip mampu meminimalisir risiko jika terjadi bencana pada BKN. Penerapan teknologi informasi secara terpolo dan terencana bagi BKN dapat membawa dampak positif bagi peningkatan profesionalitas pegawai ASN.

REKOMENDASI

Peningkatan kompetensi dan kualitas ASN diperlukan untuk membangun sistem kerja berbasis teknologi informasi di lingkungan BKN

Melakukan peningkatan pengelolaan dan pengawasan guna untuk meminimalisir risiko terhadap arsip di lingkungan BKN

Ditetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan digitalisasi arsip di lingkungan BKN yang terintegrasi dengan sistem SRIKANDI agar menjadi pendorong untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi

Melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan instansi lain agar dapat meningkatkan sistem digitalisasi arsip di lingkungan BKN

DAFTAR PUSTAKA

- Hening, Widiatmoko. Success Story Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal Provinsi Jawa Barat [Presentasi PowerPoint]
- Egbuji, A. (1999). Risk management of organizational records. *Records Management Journal*, 92), 93–116. <https://doi.org/10.1108/EUM000000007245>
- Sobandi, A., Adman, A., & Suryadi, E. Effectiveness Of Archive Management by Digitizing Documents. *Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, 19(2), 91-98.
- Sugiharto, Dhani. 2010. Penyelamatan Informasi Dokumen/Arsip di Era Teknologi Digital. *Jurnal Pusat Dokumentasi dan Informasi- LIPI*. ANRI: Jakarta. Sumber <<http://pdi.lipi.go.id/baca/index.php/baca/article/view/96>>.